

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Syafiie Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djohermansyah Djohan. 1990. *Problemik Pemerintahan dan Politik Lokal*. Cet ke-1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya.
- Stout HD. 2004. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung.
- Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Selatan: FH UI dan CV. Sinar Bakti.
- Indrati Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Dirjen POUD. *Pedoman dan Petunjuk Satuan Polisi Pamong Praja*. Jakarta: Dirjen POUD.
- Handoko Tanuwijaya. 2015. *Bisnis Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gilang Permadi. 2017. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini!*. Bogor: Yudhistira.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

### Jurnal :

- Rukmana Maris G. 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang*. Jurnal Konstituen Vol.1 No. 2.

### Website:

- Sudut Hukum, Sifat Kewenangan Pemerintahan,  
<https://suduthukum.com/2007/04/sifat-kewenangan-pemerintahan.html>  
(Diakses pada 2 Januari 2022 pukul 19.30 WIB)

SatpolPP Provinsi Jawa Tengah, Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, <https://satpolpp.jatengprov.go.id/v.2/sejarah/> (Diakses pada 30 November 2021 pukul 21.38 WIB)

Sovia Hasanah, Tindakan Penertiban Non-Yustisial oleh Satpol PP, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp/> (Diakses pada 3 Februari 2022 pukul 14.54 WIB)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke -4,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja,

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan,

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap,

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format , serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil,